

**PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA  
DI KECAMATAN PALAKKA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE**



**BOSOWA**

Oleh

**NURTATI**

4586020148

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk  
menempuh ujian Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG  
1996**

HALAMAN PENGESAHAN

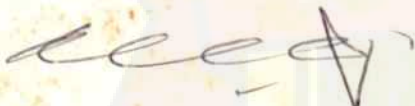
HARI INI, SABTU TANGGAL 8 JUNI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBI-  
LAN PULUH ENAM SKRIPSI DENGAN JUDUL :

PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PALAKKA KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II BONE

N A M A : N U R T A T I  
No. STB / NIRM : 4586020148 / 871133187  
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

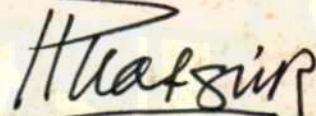
MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Drs. GUNTUR KARNAENI

PEMBIMBING II



Drs. M. NATSIR TOMPO

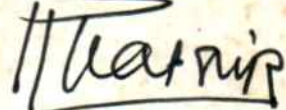
MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS "45"



Drs. GUNTUR KARNAENI

KETUA JURUSAN  
ILMU ADMINISTRASI



Drs. M. NATSIR TOMPO



HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini Sabtu Tanggal 8 Juni Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam

N A M A : N U R T A T I

NO. STB / NIRM : 4586020148 / 871133187

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Ilmu Administrasi Negara Starata Satu (S1)



Dr. Andi Jaya Sose, SE.MBA

Rektor Universitas "45"

Pengawas Umum

Prof. Dr. H. A. Mappa Nasrun, MA

Dekan Fisipol UNHAS

Panitia Ujian

Drs. Guntur Karnaeni

Drs. Suparman Mekkah

Tim Penguji

1. Drs. H. Misbahuddin A. MS
2. Drs. Guntur Karnaeni
3. Drs. Husain Hamka
4. Drs. M. Ridwan Iskandar

[Signature]  
(.....)  
[Signature]  
(.....)  
[Signature]  
(.....)  
[Signature]  
(.....)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas berkat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya dalam bentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan dalam bidang Studi Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan, mulai yang bersifat sederhana sampai kepada yang bersifat prinsipil, seperti halnya dengan pengumpulan dan pengolahan data sampai kepada penulisan yang menyangkut redaksi dan sistematika serta etika pembahasannya.

Namun berkat adanya motivasi dan keteguhan hati yang dilandasi dengan keyakinan pada diri sendiri, maka segala keterbatasan dan hambatan-hambatan itu dapat teratasi dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh penulis.

Untuk itu tiada kata yang paling patut selain dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengulurkan tangannya membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Ucapan terima kasih itu penulis tujukan kepada :

1. Bapak DR.Andi Jaya Sose, SE.MBA, sebagai Rektor Universitas 45.
2. Bapak Drs.Guntur Karnaeni, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45.

3. Bapak Drs.M.Natsir Tompo, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45.
4. Bapak Drs.Guntur Karnaeni dan Bapak Drs.M.Natsir Tompo, selaku pembimbing/konsultan yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan, dan perhatian yang besar, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.
5. Segenap Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta seluruh staf pengajar pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 yang senantiasa mencurahkan ilmu pengetahuan baik melalui bangku kuliah, maupun melalui seminar-seminar atau kajian-kajian yang sifatnya memberi tambahan pengetahuan.
6. Bupati KDH Tingkat II Bone beserta seluruh jajarannya dan lebih khusus kepada Kepala Wilayah Kecamatan Palakka beserta seluruh aparatnya serta segenap Kepala Desa dan aparatnya, juga kepada Bapak Kepala Kantor Pembangunan Desa DATI II Bone beserta aparatnya yang telah memberikan izin dan kesempatan serta bantuan dalam bentuk informasi-informasi sehingga penulis dapat merampungkan penelitian guna penulisan skripsi ini.
7. Kepada orang tua beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan yang penuh dengan kasih dan ketulusan hati dalam membimbing dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kepada rekan - rekan penulis yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materil dalam penyelesaian dari

skripsi ini. Hanya doa yang mampu penulis persembahkan kepada yang telah berjasa sebagai tanda terima kasih yang setinggi-tingginya atau segala pengorbanan dan usahanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu melindungi hambanya dan semoga segala bantuan yang diberikan membawa manfaat bagi penulis serta mendapat amalan dari Allah S.W.T      A m i n.....

Ujung Pandang,

1996

P e n u l i s

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Beberapa Pengertian</b> .....	<b>9</b>
<b>B. Dasar dan Tujuan Pembangunan Desa</b> .....	<b>16</b>
<b>C. Jenis-Jenis Bantuan Pembangunan Desa</b> .....	<b>19</b>
<b>D. Sasaran dan Manfaat Bantuan Pembangunan         Desa</b> .....	<b>21</b>
<b>E. Pentingnya Administrasi Bantuan Pembangunan         Desa</b> .....	<b>23</b>

<b>BAB</b>	<b>III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
	<b>A. Keadaan Geografi dan Demografi .....</b>	<b>26</b>
	<b>B. Potensi Sosial Ekonomi .....</b>	<b>35</b>
	<b>C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan.</b>	<b>40</b>
<b>BAB</b>	<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
	<b>A. Hasil-Hasil Bantuan Pembangunan Desa .....</b>	<b>43</b>
	<b>B. Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa .....</b>	<b>47</b>
	<b>C. Faktor - Faktor Pendorong dan Penghambat         Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB</b>	<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
	<b>B. Saran - Saran .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Luas Kecamatan dan prosentase pemanfaatan areal tanah se wilayah Kecamatan Palakka dirinci per-Desa Tahun 1995 .....	29
2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin wilayah Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	32
3. Komposisi penduduk menurut golongan umur wilayah Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	33
4. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian Wilayah Kecamatan Palakka .....	35
5. Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru SD Inpres di Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	37
6. Proyek - proyek fisik dan PKK yang telah di bangun di Desa USA dan bantuan pembangunan Desa Tahun 1992/1993 - 1994/1995 .....	44
7. Proyek - proyek fisik dan PKK yang telah di bangun di Desa MICO dan bantuan pembangunan Desa Tahun 1992/1993 - 1994/1995 .....	45
8. Cara keterlibatan responden dalam rangka perencanaaan proyek bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	51
9. Tanggapan responden tentang waktu pelaksanaan proyek bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	55

10. Bentuk - Bentuk partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	57
11. Tanggapan responden terhadap pengawasan proyek bantuan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	61
12. Tanggapan responden terhadap laporan pertanggung jawaban proyek bantuan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Palakka Tahun 1995 .....	65



## ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional bangsa Indonesia. Demikian pula penduduk bangsa Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di daerah pedesaan yang mata pencahariannya adalah bertani. Berdasarkan hal itu maka pembangunan desa ini perlu mendapat perhatian yang sesungguhnya dari pemerintah yakni dengan jalan memberikan bantuan. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan yang dikenal dengan nama "Paket Program Inpres Bantuan Pembangunan desa".

Kecamatan Palakka merupakan salah satu kecamatan di antara 25 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dimana penduduknya sebahagian besar mata pencahariannya adalah bertani.

Bantuan pembangunan desa yang diberikan kepada desa termasuk desa-desa di Kecamatan Palakka adalah merupakan alat perangsang timbulnya swadaya masyarakat dan pada akhirnya diharapkan desa mempunyai kemampuan untuk menggali potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga dapat menunjang berhasilnya pembangunan desa khususnya di Kecamatan Palakka.

Sesuai dengan judul penelitian : Pengelolaan Bantuan Desa di Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik

bagaimana proses pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan (pertanggung-jawaban), mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam rangka pengelolaan bantuan pembangunan desa sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palakka dengan mengambil desa sebagai sampel penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, untuk menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview atau wawancara terhadap responden dan informan yang telah ditentukan, dan untuk lebih menambah sempurnanya data yang diperoleh penulis juga mempergunakan kuisisioner (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada responden untuk dijawab dengan memilih jawaban yang sudah ada.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bantuan pembangunan desa yang disalurkan di Kecamatan Palakka ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disamping itu swadaya masyarakat juga mengalami kenaikan tetapi masih dalam taraf lebih rendah yang mana disebabkan oleh tingkat pendapatan atau penghidupan masyarakat desa sebahagian besar masih rendah.

Proyek-proyek pembangunan desa di Kecamatan Palakka ini adalah diprioritaskan pada pembangunan fisik dan non fisik,

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa yang dianggap cukup mendesak atau dengan kata lain program pembangunan desa yang ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan sehingga masyarakat desa diharapkan dapat menyadari akan pentingnya pembangunan dan partisipasi masyarakat.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini orientasi pembangunan tampak mulai menyebar ke wilayah pedesaan. Orientasi ini dimaksudkan untuk tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan kemampuannya sendiri. Untuk mencapai usaha ini pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dengan jalan memberi bantuan untuk wilayah pedesaan, bantuan ini dituangkan dalam suatu paket yang disebut Bantuan Pembangunan Desa yang diberikan kepada desa pada setiap tahun anggaran.

Namun masalahnya masih banyak desa yang belum memiliki kemampuan dan kesiapan dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satu diantaranya adalah adanya ketidaksanggupan lembaga-lembaga yang ada di desa, baik lembaga pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) didalam memanfaatkan bantuan yang dialokasikan kepadanya untuk menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan di wilayah pedesaan hanya dapat terwujud apabila seluruh rakyat berpartisipasi atau ikut serta dalam proses pembangunan, serta dana-dana yang diberikan kepada desa yang bersangkutan dapat dikelola oleh peme-

rintah desa dan dipergunakannya sedemikian rupa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berbicara mengenai pengelolaan bantuan pembangunan desa ini, pada prinsipnya dari pihak pemerintah pusat telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan. Dan ini sudah pada tempatnya para pelaksana pembangunan di desa baik aparat pemerintah daerah, perangkat desa, juga para pengurus LKMD, secara sungguh-sungguh menegakkan peraturan-peraturan tersebut sebagai landasan kegiatan didalam membangun pedesaan, khususnya yang menyangkut kepada usaha menumbuh kembangkan prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sebagainya, seperti yang digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982, pasal 2 ayat (2), bahwa :

" Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa. Untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial desa, serta pembinaan kesejahteraan keluarga". (1982 : 7)

Bagi masyarakat desa sendiri dengan adanya dana-dana bantuan pembangunan tersebut, berarti mendatangkan wujud keringanan dalam usahanya meningkatkan produktifitas pada setiap kegiatan yang mereka upayakan di dalam membangun diri.

Bantuan pembangunan desa tersebut adalah merupakan salah satu faktor penunjang bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa tersebut guna meningkatkan taraf hidup

dan penghidupan masyarakat pedesaan dan mendorong swadaya masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa di daerahnya khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan demikian pembangunan desa di daerah pedesaan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan daripada pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini bantuan pembangunan desa yang diberikan pada setiap desa harus benar-benar dipergunakan secara optimal bagi pembangunan atau proyek-proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lancar serta mencapai hasil yang maksimal.

#### B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembangunan merupakan masalah yang sangat penting dimana pemerintah dan aparatnya merupakan perencana dan pelaksana daripada pembangunan itu, dalam hal ini dibutuhkan pula adanya partisipasi atau dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desanya.

Bantuan pembangunan desa yang diberikan oleh pemerintah sangat mempengaruhi bahkan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, sebab tanpa bantuan dana serta swadaya dari masyarakat pedesaan sulit tercapai dengan baik. Olehnya itu memerlukan suatu penelitian dan pembahasan khusus tentang bagaimana mengelola bantuan tersebut sehingga

dapat menunjang keberhasilan pembangunan desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Berdasarkan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas, berikut ini akan diberikan beberapa rumusan yang merupakan inti persoalan yang akan dibahas dalam penelitian/skripsi ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hasil - hasil bantuan Pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ?
2. Bagaimanakah pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ?
3. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana hasil - hasil bantuan Pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan

penghambat pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Diharapkan agar dapat menghadirkan gagasan yang baru bagi penyempurnaan penyelenggaraan pengelolaan bantuan pembangunan desa khususnya bagi seluruh aparat di wilayah Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.
- b. Diharapkan agar dapat menggali informasi-informasi faktual yang bertalian dengan prosedur penggunaan bantuan pembangunan desa, mulai dari proses persiapan menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggung jawabannya.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan serta orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Type/Jenis Penelitian

Type penelitian yang digunakan adalah bersifat Deskriptif, yakni bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan keadaan obyek yang diteliti, dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh.



## 2. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam rangka pelaksanaan penelitian ini adalah meliputi aparat pemerintah Kecamatan Palakka, aparat pemerintah Desa dan para pengurus LKMD yang ada di wilayah Kecamatan Palakka.

Penarikan sampel dilakukan secara Purposive Sampling, yakni penulis menunjuk atau menentukan sejumlah sampel yang dianggap mampu untuk mewakili semua populasi yang ada. Dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Palakka, penulis mengambil 2 desa sebagai sampel, yaitu :

- a. Desa Usa
- b. Desa Mico

Adapun responden/informan yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 53 orang.

- a. Sebagai Responden 50 orang meliputi :
  - Pengurus LKMD/LMD : 20 orang.
  - Masyarakat/Tokoh Masyarakat : 30 orang.
- b. Sebagai Informan 3 orang meliputi :
  - Kepala Bangdes Kabupaten DATI II Bone.
  - Kepala Wilayah Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
  - Kaur Bangdes Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, terutama hasil yang telah dicapai.
- b. Kuesioner, yaitu perolehan data melalui pengisian angket bagi sampel yang ada.
- c. Interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dengan para responden/informan sehubungan dengan apa yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif, dengan menggunakan statistik sederhana (tabel frekuensi). Dimana hasil pengumpulan data dalam penelitian ini akan ditabulasi kemudian diprosentasekan sesuai dengan hasil pencatatan dan wawancara yang dilakukan, sehingga dengan hasil prosentase itu akan dapat memberikan gambaran secara deskriptif mengenai keadaan dari hasil keadaan yang diteliti.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini diuraikan kedudukan tiap-tiap bab dan sub bab yang ada dalam rencana penulisan yaitu :

- Bab Pertama : Terdiri atas latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua : Beberapa pengertian sehubungan dengan judul, dasar dan tujuan pembangunan desa, jenis-jenis bantuan pembangunan desa, sasaran dan manfaat bantuan pembangunan desa, serta pentingnya administrasi bantuan pembangunan desa.
- Bab Ketiga : Gambaran tentang lokasi penelitian berupa keadaan geografi dan demografi, potensi sosial ekonomi, pemerintah kecamatan.
- Bab Keempat : Pembahasan hasil penelitian berupa hasil-hasil pembangunan desa, pengelolaan bantuan pembangunan desa, serta faktor pendorong dan penghambat pengelolaan bantuan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Palakka.
- Bab Kelima : Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Menurut J.S.Poerwadarminto dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan bahwa pengelolaan artinya sama dengan mengurus. Pengelolaan dapat pula diartikan sama dengan penyelenggaraan atau pengurusan.

Dalam istilah ilmiah, pengelolaan biasanya disebut manajemen, dimana manajemen itu mempunyai fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan judul tersebut diatas.

Menurut S.P.Siagian, MPA, dalam bukunya Filsafat Administrasi mengatakan bahwa :

"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan" (1986 : 15)

Pendapat lain dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjodjo dalam bukunya Perencanaan Pembangunan bahwa :

"Perencanaan adalah meliputi proses kegiatan usaha yang terus menerus secara menyeluruh dari penyusunan program kegiatan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya". (1984 :12)

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa perencanaan memiliki tiga unsur didalamnya yaitu usaha,

perhitungan dan tujuan. Demikian perencanaan adalah proses pemikiran secara matang dan efektif dan menentukan apa yang harus diperbuat, bagaimana cara melaksanakan, siapa yang melaksanakan dan mengapa harus dilaksanakan.

Dalam hal ini proses penyusunan perencanaan mengenai bantuan desa di setiap desa harus melalui sistem perencanaan sebagai berikut :

- a. Rencana/usulan proyek dalam rangka pembangunan di tingkat desa/kelurahan di susun oleh LKMD dengan bimbingan dari Camat dengan dibantu oleh Kaur pembangunan desa di tingkat kecamatan. Rencana/usulan proyek tersebut setelah disusun kemudian diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Camat.
- b. Semua rencana proyek yang telah diterima oleh Camat kemudian dibahas bersama-sama dengan instansi yang ada di tingkat kecamatan melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), hasil pembahasan tersebut kemudian diajukan oleh Camat kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas yang dilakukan setelah ada perencanaan, pengertian pelaksanaan yaitu aktifitas yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan lebih dahulu. Cara melaksanakan pekerjaan yang baik itu yaitu sesuai dengan rencana.



Dalam rangka pelaksanaan program atau proyek bantuan pembangunan desa yang dimaksud, maka untuk kelancaran pelaksanaan proyek-proyek yang telah ditetapkan dalam perencanaan maka perlu ditetapkan :

- a. Pemimpin proyek yakni Kepala Desa/Kelurahan.
- b. Ketua pelaksana proyek yakni Ketua 1 LKMD di tiap-tiap daerah yang bersangkutan.
- c. Bendaharawan proyek yakni Kaur Keuangan Desa.

Ketiga unsur tersebut melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan proyek/kegiatan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) yang telah disahkan.
- b. Menyiapkan bahan atau material yang harus dibeli dari dana bantuan pembangunan desa.
- c. Menggerakkan masyarakat untuk pelaksanaan proyek atau kegiatan.

Setelah pelaksanaan maka selanjutnya adalah pengawasan. Sujanto memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut :

"Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan atau tugas apakah sesuai dengan semestinya". (1983 : 17)

Sedangkan menurut Mc.Farland yang dikutip dan diterjemahkan oleh Soewarno Handayaniingrat mengatakan bahwa :

"Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan

ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan". (1980 : 32)

Dalam hal ini pengawasan terhadap pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara/sistem pengawasan antara lain :

- a. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh BPK, Inspektorat Jenderal pembangunan, Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten.
- b. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tanggung jawab pembinaan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa.
- c. Pengawasan masyarakat secara langsung.

Pertanggung jawaban dalam hubungannya dengan pelaksanaan program bantuan pembangunan desa dilakukan dalam bentuk laporan. Pertanggung jawaban merupakan cara yang dilakukan untuk memberi keyakinan tentang segala aktifitas dalam suatu organisasi tertentu.

## 2. Bantuan Pembangunan Desa

Pengertian bantuan dalam hubungannya dengan judul diatas, menurut Bintoro Tjokroamidjodjo dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan, mengidentikkan kata bantuan dengan subsidi yang dapat dilihat dalam kalimatnya berbunyi :

"Subsidi atau bantuan ini dapat dibagi dua yaitu

yang bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah atau yang sudah "earmarket" yaitu yang sudah ditentukan dalam penggunaannya". (1974 : 97)  
 Dengan demikian, subsidi atau bantuan dalam

hubungannya dengan bantuan pembangunan desa dimaksudkan adalah bantuan/subsidi dalam bentuk sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat II, sebagai sumber pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Pengertian pembangunan menurut S.P.Siagian, MPA, dalam bukunya Filsafat Administrasi, menyatakan :

"Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan percobaan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa" (1986 : 20)

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pembangunan didalamnya terdapat unsur-unsur yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
4. Pembangunan mengarah kepada modernitas atau cara hidup yang baru dan mencakup aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pengertian Desa dalam UU No. 5 tahun 1974 dikemukakan sebagai berikut :

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia". (1974 : 20)

Dari kutipan diatas, dapat ditarik beberapa inti sari sebagai berikut :

1. Desa adalah suatu wilayah tertentu.
2. Desa mempunyai sejumlah penduduk tertentu.
3. Penduduk dalam suatu tertentu adalah suatu kesatuan masyarakat hukum.
4. Desa mempunyai organisasi pemerintahan, serta bagian dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia.
5. Sifat pemerintahan adalah otonom.

Selanjutnya adalah pengertian pembangunan desa dalam Kepres No. 21 tahun 1984 ditegaskan bahwa :

"Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi swadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing". (1984 : 5)

Sedangkan menurut Drs. Kansil dalam bukunya Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyatakan bahwa :

"Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat : dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan

dan fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat emmberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan". (1984 : 252)

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur pokok dari proses pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Pembangunan desa adalah suatu perubahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Pembangunan desa menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pelaksanaan secara terpadu.
3. Diarahkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.
4. Suatu konsepsi yang mencakup adanya saling ketergantungan, maksudnya bahwa pembangunan itu tidak dapat dilaksanakan oleh rakyat atau pemerintah saja, namun harus ada saling menunjang atau kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun pengertian bantuan pembangunan desa sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1984 bahwa :

"Bantuan pembangunan desa adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa dan kelurahan atas beban APBN guna memancing dan mendorong swadaya masyarakat untuk melaksanakan suatu pembangunan di desanya". (1984 : 2)

Jadi jelas bahwa bantuan pembangunan desa adalah salah satu bentuk sarana yang diberikan kepada masyarakat pedesaan melalui perangkat-perangkat desanya

dalam bentuk dana-dana bantuan dengan maksud supaya masyarakat desa yang bersangkutan segera mampu melakukan proyek pembangunan di desanya sesuai dengan aspek-aspek kehidupan yang mereka prioritaskan.

Dengan adanya bantuan pembangunan desa yang diberikan kepada setiap desa secara langsung oleh pemerintah pusat berarti desa tersebut digerakkan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desanya dan lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang diharapkan dari proses pelaksanaan pembangunan itu dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

#### B. Dasar dan Tujuan Pembangunan Desa

Bantuan pembangunan desa yang pada mulanya bernama bantuan subsidi desa berdasarkan Kepres No. 16 tahun 1969 dan Inpres No. 6 tahun 1984, setelah kelaurnya Instruksi Mendagri No. 26 tahun 1984 berubah menjadi bantuan pembangunan desa.

Bantuan pembangunan desa pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan langsung kepada setiap desa/daerah yang setingkat dengan desa, maksud pemberian bantuan adalah meningkatkan, membina dan mengarahkan usaha gotong royong masyarakat desa dalam membangun prasarana yang dibutuhkan di lingkungan desanya.

Sederhananya bantuan pembangunan desa mempunyai

makna sebagai upaya yang diberikan kepada sesuatu desa agar dapat melakukan pembangunan. Namun melihat sifatnya sebagai bantuan, maka didalamnya terkandung suatu usaha penunjang terhadap hal-hal yang khusus agar hal-hal yang dianggap khusus ini dapat terselenggara seperti yang diharapkan.

Tujuan pembangunan pada umumnya adalah supaya ada pertumbuhan dan perubahan yang secara sadar dan berencana dilakukan oleh suatu bangsa menuju modernisasi dan pembinaan bangsa untuk dapat meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Sedangkan dalam rangka pembangunan desa tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan melalui usaha pemerataan pembangunan.

Sebagai dasar untuk mengetengahkan tujuan bantuan pembangunan desa adalah Inpres No. 6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan bantuan pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan desa dalam pasal 9 disebutkan :

- (1) Bantuan desa ditujukan untuk mendorong dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desanya.
- (2) Bantuan pembangunan desa digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa dan untuk menunjang kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. (1984 :28)

Selanjutnya mengenai tujuan bantuan pembangunan desa disebutkan dalam pasal 2 Inpres No. 1 tahun 1982 yaitu :



"Bantuan pembangunan desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial desa serta pembinaan kesejahteraan keluarga". (1982 : 5)

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa ingkup bantuan pembangunan desa yaitu untuk membangun proyek-proyek prasarana :

1. Produksi, seperti irigasi dan pengairan, pembuatan petak sawah, pompa air, dan sebagainya.
2. Perhubungan, seperti jalan, jembatan desa, duiker.
3. Pemasaran, seperti pasar desa, lumbung desa.
4. Sosial desa, seperti balai desa, tempat-tempat ibadah, balai pengobatan desa, dan sebagainya.
5. Sarana bersifat ekonomi/berkembang, seperti usaha pembibitan dan pengembangan, pengolahan hasil tanaman, perikanan, pengembangan kerajinan rumah tangga dan pengembangan bidang jasa dan sebagainya.

Setelah penulis menguraikan tujuan pembangunan desa, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semuanya adalah menuju kepada perkembangan dan pertumbuhan yang baik di dalam bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual yang semuanya adalah untuk kepentingan seluruh rakyat didalam menuju cita-cita bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Didalam proses pembangunan nasional sebagai pelopor dinamisator dan stabilisator adalah

pemerintah, tugas ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah saja karena seluruh unsur didalam masyarakat harus bertanggung jawab atas suksesnya pembangunan tersebut.

Maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan bukanlah merupakan suatu tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam hubungan ini sangatlah diperlukan adanya keterlibatan dan kerja sama dari semua pihak terutama dalam lingkungan pemerintah desa/kelurahan itu sendiri agar pembangunan desa itu benar-benar tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### C. Jenis-jenis Bantuan Pembangunan Desa

#### 1. Bantuan Langsung

Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan secara langsung kepada setiap desa untuk membangun proyek-proyek atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa yang administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

#### 2. Bantuan Keserasian

Bantuan keserasian adalah bantuan yang penggunaannya diarahkan untuk mencapai keserasian pembangunan desa terpadu dalam rangka pemantapan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), menunjang penataan desa, pembinaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) serta kegiatan lainnya dalam upaya untuk meningkatkan

koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan disamping menjamin kesadaran pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa

### 3. Bantuan Khusus untuk Pemenang Perlombaan Desa

Yaitu bantuan yang diberikan kepada desa pemenang perlombaan desa sebagai penghargaan terhadap prestasi tertinggi yang telah dicapai sehingga memperoleh nilai terbaik dalam pelaksanaan pembangunan desa, baik di tingkat Kabupaten/Kotamadya DATI II, maupun di tingkat Propinsi DATI I.

Pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk merangsang usaha masyarakat dalam mengelola desanya dalam usaha mensukseskan pembangunan desa, misalnya intensifikasi pertanian, pemanfaatan halaman/pekarangan, kebersihan lingkungan dan lain-lain.

### 4. Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan.

Yaitu bantuan yang diberikan pada tingkat kecamatan untuk meningkatkan pelaksanaan operasional dan administrasi dengan kegiatan bimbingan, penyuluhan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

### 5. Bantuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Yaitu bantuan yang diarahkan untuk peningkatan

dan pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED), peningkatan pengetahuan, keterampilan masyarakat desa, pemantapan sistem UDKP dan monitoring tingkat perkembangan desa.

6. Bantuan untuk Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

#### D. Sasaran dan Manfaat Bantuan Pembangunan Desa

Agar tujuan bantuan pembangunan desa dapat dicapai dengan baik secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagai dasar atau pedoman dalam pemanfaatan bantuan pembangunan desa.

Penentuan sasaran bantuan pembangunan desa terutama didasarkan atas pertimbangan seperlunya, usaha mempercepat tingkat perkembangan desa serta dalam usaha menjamin ketahanan desa dalam berbagai bidang untuk menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan desa di masa yang akan datang.

Perkembangan sasaran bantuan pembangunan desa itu dapat dilihat dalam bagian lampiran surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/13045/sl, tahun 1984 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bantuan pembangunan desa digunakan untuk membangun proyek-proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa yang tercermin dari program masing-masing LKMD dan untuk mengadakan fasilitas dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan pedesaan dengan sistem pembangunan desa serta

kegiatan-kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga.

2. Disamping penggunaan sebagaimana dimaksud diatas, juga digunakan untuk memantapkan administrasi pemerintahan di desa dan pemantapan pelaksanaan sistem UDKP guna mempercepat pencapaian desa swasembada. (1984 : 2)

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa sasaran bantuan pembangunan desa bukan hanya dapat digunakan untuk membangun berbagai jenis prasarana desa, melainkan juga dalam berbagai sasaran lainnya seperti pemantapan administrasi dan sebagainya. Hal ini dilakukan terutama dalam upaya untuk lebih meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, sehingga dapat pula mempercepat tercapainya tingkat desa swasembada sebagaimana yang diharapkan.

Agar pembangunan desa dapat benar-benar meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan atau mendapat perhatian sebaik-baiknya adalah pemanfaatan bantuan pembangunan desa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa penggunaan bantuan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan pelaksanaan atau sasaran yang telah ditetapkan merupakan hambatan bagi terwujudnya perkembangan desa dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian dapat dilihat manfaat bantuan pembangunan desa antara lain :

1. Mendorong, menggerakkan, dan meningkatkan usaha-usaha

swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desanya.

2. Membantu desa dalam rangka usaha perluasan dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan usaha-usaha masyarakat dalam bidang ekonomi desa.

Sehubungan dengan hal itulah, agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka penggunaan bantuan pembangunan desa harus pula dimanfaatkan sebaik mungkin dan dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna karena hanya dengan upaya yang demikian merupakan langkah atau kegiatan yang mampu membawa kelancaran dan suksesnya desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

#### E. Pentingnya Administrasi Bantuan Pembangunan Desa

Administrasi merupakan keseluruhan proses kegiatan kerja sama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Program bantuan desa merupakan suatu proses yang diselenggarakan mulai dari ditetapkannya bantuan pembangunan desa melalui Instruksi Presiden.

Tertib administrasi desa merupakan persyaratan guna terciptanya tertib administrasi pembangunan desa karena melalui administrasi desa, data dan informasi mengenai pembangunan yang diperlukan dalam rangka memajukan desa dapat diperoleh secara mudah.

Seperti yang telah diketahui bahwa kedudukan Kepala Desa sebagai administrator pembangunan dan dinamisator kemasyarakatan di desanya, maka dalam pengelolaan bantuan pembangunan desa, kepala desa/kelurahan sebagai pimpinan proyek dibantu oleh :

1. Ketua 1 LKMD sebagai pelaksana harian proyek, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-hari terhadap pelaksanaan fisik dan proyek.
2. Sekretaris LKMD sebagai sekretaris proyek, bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi dan laporan fisik dan keuangan proyek.
3. Pemegang kas proyek adalah sekretaris desa/kelurahan bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
  - a. Menerima, menyimpan dan membayar serta bertanggung jawab atas bantuan pembangunan desa.
  - b. Menyelenggarakan administrasi pembukuan uang bantuan.
  - c. Membuat daftar pertanggung jawaban (SPJ) uang bantuan.

Dengan dilaksanakan perencanaan dari bawah atau Bottom Up Planning, maka peranan aparatur pemerintah desa sangat besar terutama turut bersama-sama dengan LKMD dalam merumuskan skala prioritas bagi alokasi dana bantuan pembangunan desa tersebut.

Fungsi aparatur pemerintah desa dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek adalah :



1. Persiapan penyusunan.

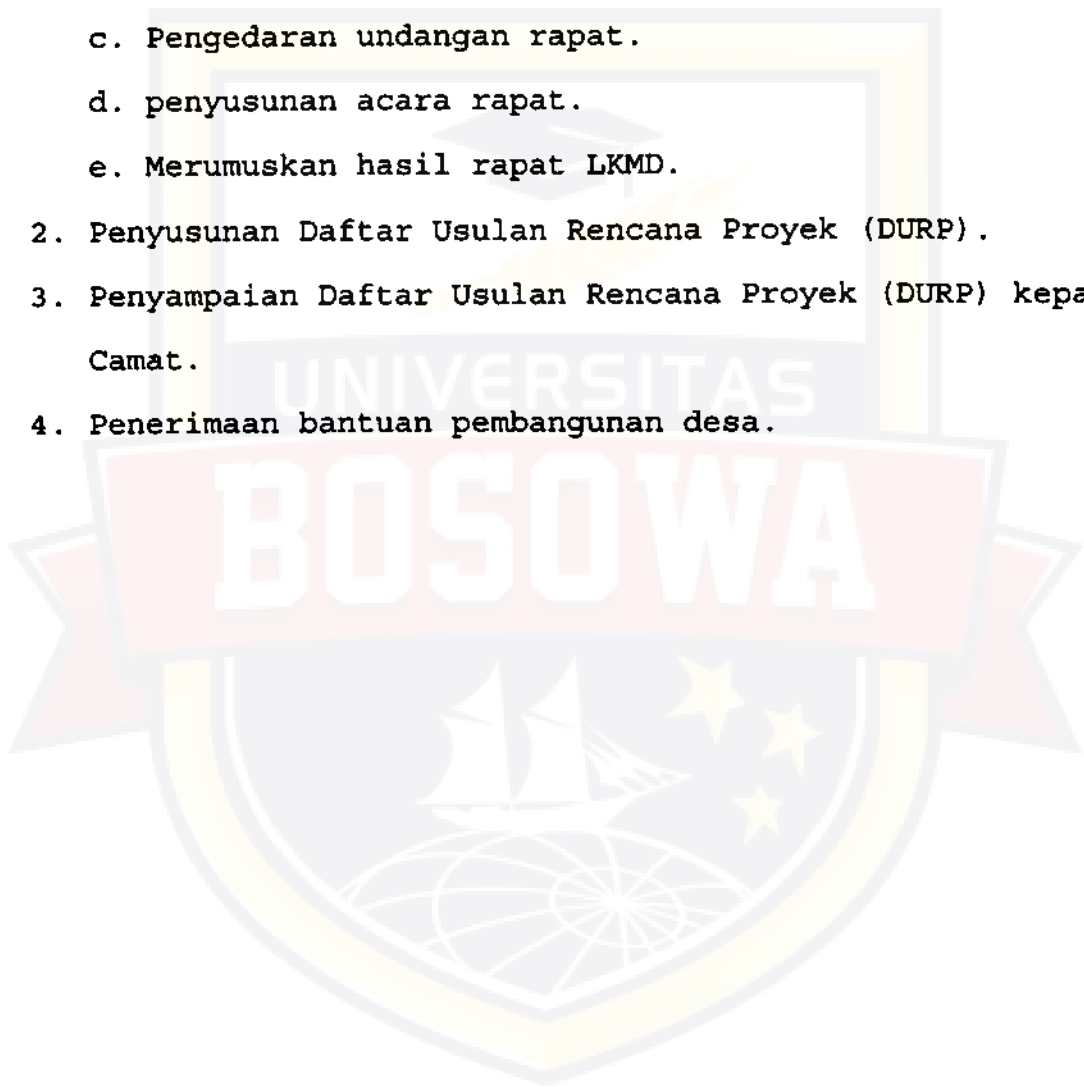
Dalam hal ini disusun jadwal kegiatan meliputi :

- a. Rapat desa atau rembuk desa.
- b. Inventarisasi proyek-proyek desa.
- c. Pengedaran undangan rapat.
- d. penyusunan acara rapat.
- e. Merumuskan hasil rapat LKMD.

2. Penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).

3. Penyampaian Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) kepada Camat.

4. Penerimaan bantuan pembangunan desa.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografi dan Demografi

Dilihat secara faktual jelas nampak, bahwa untuk mengoperasionalkan kegiatan pembangunan regional ataupun sektoral maka kita tak boleh luput memperhatikan kondisi geografi maupun demografi dari lokasi bersangkutan. Tentunya hal ini disebabkan karena kedua kondisi tersebut merupakan unsur lingkungan hidup dan sebagai tempat menyelenggarakan pembangunan, dan demikian pula menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam rangka merealisasikan salah satu program pembangunan, yaitu Program Bantuan Pembangunan Desa.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, dalam pembahasan berikut ini secara berturut-turut akan diketengahkan menyangkut kedua macam kondisi yang dimaksudkan itu, khususnya yang berada di lingkungan Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone, yaitu :

#### 1. Keadaan Geografi

##### 1.a. Letak Wilayah

Sudah umum diketahui bahwa letak suatu wilayah akan mempunyai pengaruh kuat terhadap kondisi isolasi wilayah terhadap nilai-nilai perkembangan yang ada di dalam lingkungan wilayah tersebut dengan wilayah lain disekitarnya. Dan dari hasil pengamatan penulis selama

melakukan penelitian, nampak bahwa wilayah Kecamatan Palakka memiliki nilai yang cukup terbuka untuk melakukan kegiatan - kegiatan yang bersifat progressive bagi usaha-usaha pembangunan dimasa yang akan datang.

Kondisi seperti itu terutama sekali dapat dilihat dari sudut tersedianya prasarana lalu lintas barang maupun jasa yang melewati dan sekaligus juga menghubungkan wilayah tersebut terhadap daerah-daerah lain yang berbatasan dengannya, yaitu berupa jalan propinsi yang berkedudukan sebagai jalur komunikatif.

Kecamatan Palakka merupakan salah satu kecamatan dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, dan terdiri dari 15 desa dimana pusat pemerintahannya berada pada poros Ujung Pandang-Bone dan berbatasan dengan Kotif Watampone, dengan jarak dari ibu kota Kabupaten DATI II Bone kurang lebih 5 km. Kecamatan Palakka berbatasan dengan beberapa wilayah Kecamatan antara lain :

- Sebelah utara Kecamatan Awangpone.
- Sebelah timur Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- Sebelah selatan Kecamatan Barebbo.
- Sebelah barat Kecamatan Ponre dan Kecamatan Ulaweng.

Jadi, sekali lagi dapat dikatakan bahwa letak Kecamatan Palakka terhadap pusat-pusat fasilitas pengembangan hasil usaha masyarakat nampak menjadi sangat strategis dan memberi harapan-harapan yang

cukup besar bagi upaya menumbuh kembangkan produk-produk pedesaan pada wilayah itu.

Dalam kedudukannya yang strategis itu, menurut hemat penulis bahwa sesuatu wilayah akan dapat diharapkan mengembangkan beberapa macam proyek pembangunan desa seirama dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan dasar pembangunan masyarakat di dalam lingkungan bersangkutan maupun wilayah yang ada atau berbatasan dengannya. Dan sesuai pula dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari kondisi semacam ini, maka nantinya diharapkan wilayah tersebut mampu meningkatkan angka pendapatan asli desa untuk menopang pembangunan prasarana-prasarana lain yang diperlukan oleh setiap desa di wilayah tersebut.

#### 1.b. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Palakka meliputi areal tanah seluas  $115,26 \text{ km}^2$  yang tersebar di 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.

Gambaran umum wilayah Kecamatan Palakka jika dirinci berdasarkan luas dan pemanfaatan lahan pada setiap desanya, dapat kita perhatikan dalam tabel berikut ini (1).

Tabel 1

Luas Kecamatan dan Presentase pemanfaatan areal  
Tanah se Wilayah Kecamatan Palakkka  
Dirinci per Desa Tahun 1995

No.	Nama Desa	Luas Desa (km <sup>2</sup> )	Pemanfaatan areal tanah/desa	
			Sawah	Tanah Kering
			Ha	Ha
01	Cinennung	11,04	216,20	888,10
02	Lemoape	15,14	145,00	1369,00
03	Pasempe	9,76	84,40	891,60
04	Usa	9,33	264,00	668,67
05	Passippo	6,88	240,00	448,17
06	Panyili	6,54	350,20	303,40
07	Mt. Bua	6,01	320,69	280,50
08	Melle	9,88	514,00	474,00
09	Mico	10,51	345,50	411,21
10	Siame	4,31	55,00	375,70
11	Ureng	4,66	131,50	334,84
12	T. Tengah	7,10	256,20	454,83
13	Tirong	3,32	175,20	157,10
14	Maduri	5,81	307,31	273,49
15	Bainang	4,97	359,50	437,79
	Jumlah	115,26	3764,70	7768,40

Sumber data : Hasil olah data penulis, berdasarkan data tentang monografi desa se-wilayah Kecamatan Palakka, Tahun 1995.

Dari tabel 1 tersebut diatas, menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Palakka secara keseluruhan yaitu seluas 115,26 km<sup>2</sup>, dengan pemanfaatan areal tanah seluas 3764,70 ha untuk areal persawahan dan 7768,40 ha untuk areal tanah kering.

### 1.c. Keadaan Alam dan Iklim

Kecamatan Palakka merupakan daerah yang sebagian wilayahnya adalah dataran rendah dan sebagian lagi bukit dan pegunungan. Dengan keadaan alam yang demikian, maka perbandingan antara luas tanah-tanah yang ada tidak seimbang. Keadaan alam atau bentuk wilayah Kecamatan Palakka adalah sebagai berikut :

- Datar sampai berombak = 20 %
- Berombak sampai berbukit = 40 %
- Berbukit sampai bergunung = 40 %

Adapun iklim wilayah Kecamatan Palakka adalah beriklim sedang dan dikenal adanya dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya mulai pada bulan Mei sampai dengan bulan September, sedang musim hujan biasanya mulai pada bulan Nopember sampai dengan bulan April.

Wilayah Kecamatan Palakka mempunyai curah hujan kurang lebih 1.859 m/tahun, dan suhu maximum/minimum adalah 22 ° C / 34 ° C.

### 2. Keadaan Demografi

Salah satu potensi desa yang perlu mendapat perhatian adalah sumber manusia yang dapat menunjang perkembangan dan pelaksanaan pembangunan baik dilihat dari segi umur, mata pencaharian, dan jenis kelamin.

Masalah kependudukan (demografi) juga merupakan

persoalan esensial yang memerlukan penanganan khusus dalam setiap proses pembangunan. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa penduduk bukan saja sebagai obyek pembangunan melainkan juga sebagai subyek (pelaku utama) dari kegiatan yang ingin dilakukan dalam proses pembangunan tersebut.

Berbicara mengenai pembangunan, khususnya didalam lingkungan wilayah Kecamatan Palakka akan kita tinjau aspek-aspek demografi atau keadaannya secara berurutan berikut ini :

#### 2.a. Keadaan atau Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Keadaan atau komposisi penduduk wilayah Kecamatan Palakka berdasarkan kepada data hasil sensus penduduk, bahwa jumlah penduduk wilayah Kecamatan Palakka sebanyak 18.626 jiwa, yang terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak 8.585 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 10.041 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.084 KK.

Mengenai distribusi penduduk menurut pembagian jenis kelamin dapat dilihat pada tabel (2) berikut ini :



Tabel 2  
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin  
Wilayah Kecamatan Palakka  
Tahun 1995

No.	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	Cinennung	604	713	1317
02	Lemoape	845	1040	1893
03	Pasempe	849	1074	1923
04	Usa	723	791	1514
05	Passippo	586	618	1204
06	Panyili	404	459	863
07	Mt. Bua	594	796	1390
08	Melle	713	820	1542
09	Mico	643	708	1351
10	Siame	574	622	1196
11	Ureng	491	549	1040
12	T. Tengah	542	575	1117
13	Tirong	300	384	684
14	Maduri	305	361	666
15	Bainang	412	519	926
	Jumlah	8585	10041	18626

Sumber data : Hasil olah data penulis, berdasarkan data tentang monografi desa se-wilayah Kecamatan Palakka, Tahun 1995.

Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, maka jelas bahwa penduduk Kecamatan Palakka yang tersebar dalam 15 desa yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa Desa Pasempe merupakan desa yang terbanyak penduduknya dan Desa Maduri merupakan desa yang paling sedikit penduduknya jika dibandingkan dengan desa - desa yang lain.

Dalam tabel tersebut juga menunjukkan kepada kita

bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

#### 2.b. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk menurut golongan umur merupakan salah satu aspek demografi yang juga sangat penting dalam pembangunan, karena dengan mengetahui komposisi penduduk tersebut berbagai kebutuhan pembangunan dapat diwujudkan, baik disisi perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Adapun komposisi penduduk menurut Umur di Kecamatan Palakka, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3  
Komposisi Penduduk menurut golongan Umur  
Kecamatan Palakka, Tahun 1995

No	Golongan	Jumlah Dalam Angka
1	0 - 4 Tahun	1857
2	5 - 9 "	2386
3	10 - 14 "	2516
4	15 - 19 "	1918
5	20 - 24 "	1511
6	25 - 29 "	1407
7	30 - 34 "	1333
8	35 - 39 "	1341
9	40 Tahun Keatas	4 323
	Jumlah	18626

Sumber data : Hasil olahan penulis berdasarkan data kependudukan tiap desa se-wilayah Kecamatan Palakka, Tahun 1995.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan golongan 40 tahun keatas merupakan yang terbanyak dan golongan 30 - 34 tahun merupakan yang paling sedikit. Dari tabel 3 tersebut juga dapat diketahui berapa jumlah penduduk golongan yang masih produktif yaitu antara umur 15 - 39 tahun sebanyak 7603 jiwa, sedangkan golongan umur yang non produktif yaitu 40 tahun keatas sebanyak 6298 jiwa. Dalam hubungannya dengan pembangunan maka untuk golongan umur yang produktif harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menunjang berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan.

#### 2.c. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Salah satu tinjauan mengenai penduduk yang juga mempunyai peranan penting yaitu ditinjau dari sudut mata pencahariannya. Keadaan penduduk menurut mata pencahariannya dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam suatu daerah tertentu.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dalam suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan potensi wilayah yang bersangkutan atau kondisi alam wilayah / lingkungannya.

Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4

## Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Kecamatan Palakka, Tahun 1995

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	3792 Orang
2.	Pengusaha Sedang/Besar	20 Orang
3.	Pengrajin industri / Kecil	220 Orang
4.	Buruh Bangunan	39 Orang
5.	Buruh Perkebunan	116 Orang
6.	Pedagang	63 Orang
7.	Pegawai Negeri Sipil	202 Orang
8.	A B R I	11 Orang
9.	Peternak	7471 Orang
Jumlah		11934 Orang

Sumber Data : Diperoleh dari Data statistik Kantor  
Kecamatan Palakka, Tahun 1995

Berdasarkan data yang dikemukakan dalam tabel 4 di atas, tampak bahwa penduduk yang mata pencahariannya sebagai peternak yang paling dominan, yaitu 7471 orang kemudian penduduk yang mata pencahariannya petani yaitu 3792 orang, sedangkan penduduk yang mata pencahariannya dari golongan ABRI merupakan yang paling sedikit yaitu 10 orang.

## B. Potensi Sosial Ekonomi

### 1. Pendidikan

Faktor pendidikan baik formal maupun informal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang proses pembangunan, baik dalam perencanaan

maupun dalam pelaksanaannya. Namun yang menjadi masalah, yaitu prasarana pendidikan untuk tingkat SLTP dan SLTA di wilayah Kecamatan Palakka. Dimana daerah tersebut tidak terdapat prasarana pendidikan untuk tingkat SLTA dan untuk tingkat SLTP hanya terdiri atas 1 SLTP negeri serta 1 Madrasah Tidaiyah.

Untuk prasarana pendidikan SLTP berada di Desa Mattanete Bua dan Madrasah Tidaiyah terdapat di Desa Lemoape. sedangkan untuk prasarana pendidikan Sekolah Dasar jumlahnya yaitu 10 SD Inpres yang terletak di beberapa desa.

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Palakka dapat kita lihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5

Banyaknya Sekolah Dasar, Kelas, Murid dan Guru  
SD.Inpres di Kecamatan Palakka, 1995

No	D e s a	B A N Y A K N Y A			
		Sekolah	Kelas	Murid	Guru
1	Cinennung	1	6	117	6
2	Lemoape	1	6	56	4
3	Pasempe	1	6	112	9
4	Usa	-	-	-	-
5	Passippo	1	6	168	11
6	Panyili	1	6	60	10
7	Mt. Bua	1	6	94	9
8	Melle	1	6	110	6
9	Mico	1	6	110	7
10	Siame	-	-	-	-
11	Ureng	1	6	105	8
12	Tanah Tengah	-	-	-	-
13	Tirong	-	-	-	-
14	Maduri	1	6	90	10
15	Bainang	-	-	-	-
	Jumlah	10	60	1031	80

Sumber data : Diperoleh dari data statistik Kantor Kecamatan Palakka, Tahun 1995.

Dari tabel 5 diatas, dapat dilihat yaitu bahwa dari 15 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Palakka, ada 5 desa yang tidak mempunyai sarana pendidikan Sekolah Dasar yaitu desa Usa, Siame, Tanah Tengah, Tirong, dan Bainang.

Adapun sarana pelayanan masyarakat didalam bidang komunikasi dan transportasi khususnya di Kecamatan Palakka adalah sebagai berikut :

a. TV Umum	sebanyak	9 buah
b. Sepeda Motor	sebanyak	150 buah
c. Oplet/Mikrolet	"	7 buah
d. Mobil Dinas	"	1 buah
e. Mobil Pribadi	"	4 buah
f. Sepeda	"	105 buah
g. Dokar/Delman	"	25 buah
h. Gerobak	"	16 buah

### 3. Kesehatan

Seiring dengan usaha-usaha peningkatan dalam berbagai sektor, maka di wilayah Kecamatan Palakka diusahakan pula pengembangan dan pembinaan dan kesehatan masyarakat.

Adapun sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang terdapat di wilayah Kecamatan Palakka adalah sebagai berikut :

a. Puskesmas	sebanyak	1 Buah
b. Pustu	"	4 Buah
c. Posyandu	"	20 Buah
d. Tenaga Dokter	"	1 Orang
e. Bidan	"	4 Orang
f. Bidan Pembantu	"	1 Orang
g. Juru Rawat	"	3 Orang
h. Dukun Bayi Terlatih	"	20 Orang
i. Apoteker	"	1 Orang



#### 4. Keluarga Berencana

Kecamatan Palakka merupakan salah satu daerah jangkauan pelaksanaan program Keluarga Berencana, karena itu penyuluhan program ini terus dilakukan oleh pemerintah agar dapat menciptakan keluarga kecil yang bahagia.

Kenyataan yang ada menunjukkan program KB di Kecamatan Palakka ini dapat digolongkan berhasil, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah akseptor KB aktif sebagaimana perincian sebagai berikut :

- |                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| a. Jumlah Pos/Klinik KB               | : | 3 Buah      |
| b. Jumlah PUS ( Pasangan Usia Subur ) | : | 2669 pasang |
| c. Jumlah PUS masuk KB                | : | 1773 pasang |
| d. Jumlah akseptor KB =               |   |             |
| - PIL                                 | : | 1425 Orang  |
| - IUD                                 | : | 20 Orang    |
| - Kondom                              | : | 4 Orang     |
| - Suntik                              | : | 269 Orang   |
| - Implan                              | : | 45 Orang    |
| - KB Mandiri                          | : | 5 Orang     |
| - MOP                                 | : | 5 Orang     |

Dari data diatas, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa masyarakat setempat sudah memiliki kesadaran untuk melaksanakan KB. Hal ini dapat dicapai berkat usaha pemerintah secara kontinue dalam memberikan

penyuluhan (motivasi) kepada masyarakat.

## 5. Agama

Penduduk wilayah Kecamatan Palakka yang terdiri atas 18.626 jiwa itu semuanya beragama Islam dan ini berarti bahwa tidak ada campur tangan agama lain yang ada di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan bagi umat beragama akan tempat peribadatan maka dibangunlah sarana-sarana peribadatan baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat.

Adapun sarana/tempat peribadatan yang telah dibangun di wilayah Kecamatan Palakka antara lain :

- a. Mesjid : 18 Buah
- b. Surau / Musallah : 19 Buah

## C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Sebelum membahas tentang struktur organisasi pemerintahan kecamatan Palakka, oleh penulis perlu terlebih dahulu menguraikan pula dua hal penting yang ada hubungannya dengan pembahasan mengenai struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Palakka yaitu organisasi dan struktur organisasi serta penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Pengertian Organisasi

Mengenai struktur organisasi, penulis mengutip satu pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Prayudi Atmosudirdjo yaitu :

"Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama - sama mencapai suatu tujuan tertentu" (1984 :6)

Dari pengertian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok kerja sama yang didalamnya terdapat pembagian tugas/kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Pengertian Struktur Organisasi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh The Liang Gie, pengertian struktur organisasi adalah :

"Struktur organisasi atau bagan organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi serta wewenang dan juga tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari orang yang diberi tugas, atau tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan" (1979 : 27)

Setelah membahas tentang pengertian organisasi dan struktur organisasi, maka selanjutnya penulis membahas mengenai struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Palakka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1984 dijelaskan tentang struktur organisasi pemerintahan kecamatan.

Pemerintahan kecamatan adalah merupakan pelaksana kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih rendah dibawah pemerintah daerah atau Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah

kecamatan dibantu oleh perangkat pemerintah kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28/1984 dijelaskan sebagai berikut :

a. Camat

Adalah sebagai pemimpin pemerintahan kecamatan, administrator pembangunan dan sebagai dinamisor kemasyarakatan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memimpin menyelenggarakan pemerintahan kecamatan.
- Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat di kecamatan.

b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, camat dibantu oleh :

1. Mantri Pamong Praja
2. Instansi otonom yang membawahi :
  - Bagian PKK
  - " Pemerintahan
  - " Peternakan
3. Unsur aparat Departemen Dalam Negeri yang membawahi :
  - Bagian Agraria
  - Wamil/Hansip (Pertahanan Sipil)
4. Sekretaris wilayah kecamatan yang membawahi :
  - Kepala Urusan Pemerintahan
  - Kepala Urusan Kemasyarakatan
  - Kepala Urusan Pembangunan
  - Kepala Urusan Administrasi.



## B A B IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil - Hasil Bantuan Pembangunan Desa.

Sebagai realisasi diberikannya dana bantuan pembangunan desa pada setiap desa diseluruh tanah air Indonesia, maka bantuan ini dipergunakan untuk membangun prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan skala prioritas, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Seperti halnya Desa/Kelurahan yang lain, maka kedua desa sample penelitian, dana bantuan ini pun dipergunakan untuk membangun proyek - proyek desa yang dibutuhkan masyarakat setempat dimana masyarakat harus terlibat didalamnya sebagai perencana dan pelaksana proyek.

Berikut ini akan diuraikan proyek-proyek yang telah dibangun dengan dana bantuan pembangunan desa pada kedua desa di Wilayah Kecamatan Palakka Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Untuk lebih jelasnya jenis proyek dan jumlah bantuan yang diberikan kepada desa tersebut dapat dilihat pada masing-masing tabel pada halaman berikut ini.

Proyek-Proyek Fisik yang telah dibangun  
di Desa Mico dan Bantuan Pembangunan Desa  
Tahun 1992/1993 - 1994/1995

Tahun	Jenis Kegiatan	Sifat Proyek	Sumber Biaya		Jumlah
			Bantuan Pusat	Swadaya	
1992/ 1993	-Jembatan/Jalan Desa	Fisik	2.600.000	1.000.000	3.600.000
	-B.B LKMD	Non Fisik	200.000	500.000	700.000
	-UP2K Jahid men- jahit	PKK	400.000	300.000	700.000
	-Tanaman peka- rangan	PKK	200.000	100.000	300.000
	-P4 & Adm. PKK	PKK	100.000	100.000	200.000
1993/ 1994	-2 buah Duiker	Fisik	1.800.000	1.000.000	2.800.000
	-Jalan Desa	Fisik	1.700.000	1.500.000	3.200.000
	-Penyertaan modal koperasi PKK	PKK	500.000	400.000	900.000
	-10 Program PKK Ternak sapi	PKK	750.000	300.000	1.050.000
	-Adm PKK	PKK	50.000	200.000	250.000
1994/ 1995	-Pemb. Musallah	Fisik	4.000.000	2.000.000	6.000.000
	-Tempat Ibadah Desa Mico	Fisik	500.000	750.000	1.250.000
	-10 Program PKK Ternak sapi	PKK	750.000	300.000	1.050.000
	-UP2K/Tambahan modal Koperasi	PKK	500.000	350.000	850.000
	-Adm PKK	PKK	50.000	150.000	200.000
	Jumlah		14.200.000	8.900.000	23.100.000

Sumber data : Kantor Bangdes Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bone.

Proyek-Proyek Fisik yang telah dibangun  
di Desa USA dan Bantuan Pembangunan Desa  
Tahun 1992/1993 - 1994/1995

Tahun	Jenis Kegiatan	Sifat Proyek	Sumber Biaya		Jumlah
			Bantuan Pusat	Swadaya	
1992/ 1993	-Jalan Desa	Fisik	1.600.000	7.000.000	8.600.000
	-Duiker 2 buah	Fisik	1.000.000	5.000.000	6.000.000
	-B.B LKMD	Non Fisik	150.000	200.000	350.000
	-Orientasi LKMD	Non Fisik	50.000	150.000	200.000
	-UP2K PKK	PKK	400.000	500.000	900.000
	-10Program PKK	PKK	200.000	150.000	350.000
	-P4 & Adm. PKK	PKK	100.000	100.000	200.000
1993/ 1994	-Jalan Desa	Fisik	1.700.000	2.000.000	3.700.000
	-Duiker	Fisik	1.800.000	2.000.000	3.800.000
	-Penyertaan modal koperasi PKK	PKK	500.000	200.000	700.000
	-10 Program PKK Ternak sapi	PKK	750.000	150.000	900.000
	-Adm PKK	PKK	50.000	200.000	150.000
1994/ 1995	-Jalan Desa	Fisik	1.450.000	8.000.000	9.450.000
	-Duiker 4 buah	Fisik	3.000.000	7.000.000	10.000.000
	UP2K	PKK	500.000	400.000	900.000
	-10 Program PKK Ternak sapi	PKK	600.000	300.000	950.000
	-Adm PKK	PKK	50.000	100.000	150.000
	-Adm PKK	PKK	50.000	100.000	200.000
	Jumlah		13.450.000	33.450.000	46.900.000

Sumber data : Kantor Bangdes Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bone.



Dari tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 1992/1993 - 1994/1995 proyek-proyek fisik dan PKK yang telah dibangun di Desa Mico menggunakan dana bantuan pembangunan Desa yang Jumlahnya Rp. 13.500.000,- dengan swadaya masyarakat yang mampu diserap sebesar Rp. 8.500.000,- jadi jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 22.000.000,-.

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa proyek-proyek fisik dan PKK yang telah dibangun di Desa USA tahun anggaran 1991/1992 - 1993/1994 menggunakan dana bantuan pembangunan desa sebesar Rp. 13.500.000,- dengan swadaya masyarakat yang mampu diserap sebesar Rp. 13.750.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 27.250.000,-.

Tabel 6 dan 7 menunjukkan bahwa swadaya masyarakat yang mampu diserap di dua desa tersebut melebihi dari jumlah bantuan pembangunan desa dan sebagian desa lainnya masih lebih kecil dari jumlah bantuan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan informasi yang penulis peroleh dari informan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan masih rendah disamping juga itu tingkat pendapatan ataupun tingkat penghidupan masyarakat masih relatif rendah, sehingga masih sering dijumpai kurang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desanya.

## B. Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa.

Pengelolaan bantuan pembangunan desa yang dimaksud mencakup antara lain :

### 1. Perencanaan Penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.

Kelancaran dan keberhasilan suatu proses kegiatan dalam mencapai tujuan, sangat ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat yang merupakan suatu sistem yang berkaitan satu sama lain.

Perencanaan merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan proyek karena dengan perencanaan itulah dapat ditentukan tujuan, besarnya biaya, orang yang melakukan program, jangka waktu pelaksanaan dan lain -lain.

Demikian pula dengan adanya program bantuan pembangunan desa yang merupakan program rutin setiap tahun oleh Pemerintah Pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Bantuan pembangunan desa tersebut merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka berbagai peraturan yang melandasinya yang mana telah dijelaskan bahwa sistem perencanaan program/proyek bantuan pamban-

gunaan desa harus berdasarkan perinsip perencanaan dari bawah, harus dilihat dari segi prioritas, benar-benar diperlukan, sesuai dengan kemampuan masyarakat desa, tepat waktu, dapat dilaksanakan dan dapat diawasi.

Adapun perencanaan penggunaan bantuan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Palakka, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa setempat dapat disimpulkan kedalam beberapa tahap antara lain :

- a. tahap penyusunan bahan-bahan (materi) pembahasan dalam rapat LKMD di masing-masing desa yang bersangkutan.

Pada tahap ini Kepala Desa bersama-sama dengan pengurus LKMD mengumpulkan data-data melalui informasi atau masukan-masukan dari masyarakat Desa/Tokoh masyarakat menyangkut permasalahan sarana sarana dan prasaran desa yang dibutuhkan. Setelah data-data atau masukan-masukan tersebut terkumpul maka Kepala Desa bersama sama dengan para pengurus LKMD menyusun suatu daftar permasalahan desa yang perlu segera diatasi berdasarkan skala prioritas.

- b. Tahap Pembahasan rencana dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).

Pada tahap ini Kepala Desa menetapkan jadwal pelaksanaan rapat LKMD/LMD dengan mengundang ketua atau anggota pengurus LKMD untuk membahas permasa-

han-permasalahan yang ada, lalu menentukan rencana proyek pembangunan desa atau dalam hal ini melakukan penginventarisasian tentang proyek-proyek yang akan dilaksanakan yang akan diusulkan dalam rapat tersebut, kemudian menentukan biaya-biaya yang digunakan dari bantuan pembangunan desa dan swadaya dari masyarakat. Hasil musyawarah desa ini kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan desa.

c. Tahap Penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).

Dengan berdasarkan pada keputusan/musyawarah desa tersebut, Kepala Desa dibantu oleh personalia proyek dalam menyusun daftar usulan rencana Proyek (DURP) yang meliputi :

- Nama/jenis proyek
- Lokasi proyek
- Ukuran/kapasitas proyek
- Sifat proyek (baru, rehabilitasi, perluasan)
- Mamfaat / tujuan proyek
- Sumber pembiayaan
- Rencana penggunaan biaya
- Waktu pelaksanaan proyek dan lain-lain.

Daftar Usulan Rencana Proyek tersebut, setelah disetujui dalam rapat (musyawarah) LKMD, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan DURP ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone melalui Camat untuk

disahkan.

Camat dibantu oleh petugas pembangunan Desa meneliti/menilai dengan mengolah usulan/rencana proyek bantuan pembangunan Desa yang diajukan dari tiap Desa dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

d. Tahap Penerimaan Dana Bantuan Pembangunan Desa.

Setelah Daftar usulan rencana proyek tersebut disahkan Oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat dan kemudian direvisi kembali oleh aparat Kantor Bangdes, maka Kepala Desa ke Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II guna mendapatkan surat perintah pencairan dana pemabangunan sekaligus surat-surat keputusan mengenai personalia penanggung jawab proyek yang akan diselenggarakan.

Setelah dana-dana dicairkan pada Kantor BRI Cabang kabupaten, maka dana-dana didistribusikan kepada Ketua I LKMD sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek. Sampai disini, maka proyek-proyek yang akan dibangun sudah siap untuk dilaksanakan.

Dalam hubungan dengan perencanaan proyek bantuan desa, maka cara yang ditempuh dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek meliputi :

1. Memberikan saran atau usul dalam rapat LKMD/LMD.
2. Memberikan saran atau usul di luar rapat LKMD/LMD.

Pada tabel berikut ini akan menunjukkan cara

keterlibatan responden dalam perencanaan proyek bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Palakka.

Tabel 8

Cara Keterlibatan Responden Dalam Rangka  
Perencanaan Bantuan Pembangunan Desa  
di Kecamatan Palakka

No	Cara keterlibatan	Frekuensi	Prosentase
1	Cara memberikan saran atau usul dalam rapat LKMD/LMD	22	44 %
2	Memberikan saran atau usul diluar rapat LKMD/LMD	17	34 %
3	Tidak terlibat baik pada butir (1) dan (2)	11	22 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber data : Hasil olahan penulis berdasarkan hasil kusioner, tahun 1995.

Tabel 8 tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang terlibat dalam perencanaan proyek bantuan pembangunan desa sebanyak 78 % yang meliputi 44 % memberikan saran atau usul didalam rapat LKMD/LMD, dan 34 % memberikan saran atau usul diluar rapat LKMD/LMD serta yang tidak terlibat sama sekali sebanyak 22 %.

Dengan melibatkan Masyarakat dalam rangka perencanaan proyek bantuan pemabngunan Desa, dimaksudkan agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan desa itu

sendiri.

Tampa adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa sulit untuk dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna sasaran ataupun tujuan pembangunan desa.

## 2. Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.

Sebagai tindak lanjut setelah disahkannya proyek yang telah diusulkan/direncanakan dan diterimanya dana bantuan Pembangunan Desa adalah pelaksanaan proyek tersebut. Dari hasil penelitian (wawancara) penulis dengan informan dan Kepala Desa sample penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum proyek - proyek bantuan pembangunan desa dilaksanakan terlebih dahulu Kepala Desa mengadakan pertemuan - pertemuan dengan tokoh - tokoh masyarakat dan pengurus LKMD untuk menetapkan waktu dimulainya pelaksanaan kegiatan proyek yang harus dikerjakan.

Jika proyek tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga (swadaya masarakat) yang relatif banyak maka pelaksana proyek harus memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat, misalnya waktu luang masyarakat agar mereka dapat menyumbangkan tenaga, materi atau harta miliknya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek tersebut.

Pelaksanaan proyek yang dilaksanakan sesuai dengan



situasi dan kondisi masyarakat setempat akan menunjang pencapaian tujuan proyek tersebut serta mencapai hasil yang maksimal.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek bantuan pemabangunan desa, maka dibentuklah susunan pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebagai pemimpin proyek, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keuangan dan fisik proyek.
- b. Sekretaris Desa sebagai bendaharawan proyek bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
  - Menerima dan menyimpan uang dana bantuan pembangunan desa dan membayar bahan-bahan yang dibeli dalam rangka pembangunan proyek.
  - Menyelenggarakan administrasi pembukaan uang dana bantuan desa dengan lampiran bukti - bukti kas.
  - membuat surat pertanggung jawaban uang bantuan pembangunan desa.
- c. Ketua I LKMD dan ketua seksi - seksi LKMD yang ada kaitannya dengan jenis proyek yang dibangun, masing-masing selaku pelaksana harian proyek dan pembantu pelaksana proyek bertugas dan bertanggung

jawab terhadap realisasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dengan terbentuknya susunan pelaksanaan proyek seperti telah dijelaskan diatas, diharapkan pelaksanaan proyek atau kegiatan proyek yang bersangkutan dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu tertentu misalnya 1 tahun anggaran yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan supaya proyek yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada tabel berikut ini akan menunjukkan kepada kita tentang tanggapan responden terhadap waktu pelaksanaan proyek bantuan pembangunan Desa sample penelitian diwilayah Kecamatan Palakka.

Tabel 9

Tanggapan responden tentang waktu pelaksanaan  
 Proyek Bantuan Pembangunan Desa  
 di Kecamatan Palakka, Tahun 1995

No	Kategori penelitian	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat tepat waktu	6	12 %
2	Tepat waktu	13	26 %
3	Kurang tepat waktu	16	32 %
4	Tidak tepat waktu	15	30 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber Data : Hasil olahan penulis berdasarkan hasil kuisioner, tahun 1995

Dari tabel 9 tersebut, menunjukkan kepada kita bahwa diantara 50 responden terdapat 6 responden (12%) menyatakan bahwa pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Palakka yang sangat tepat waktu, 13 responden (26 %) menyatakan tepat waktu, sebanyak 16 responden (32 %) memberikan jawaban bahwa pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Desa kurang tepat waktu serta sebanyak 15 responden (30 %) menyatakan tidak tepat waktu.

Dari tabel tersebut bila dianalisa lebih

lanjut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa di kecamatan Palakka belum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dimana dari 50 responden yang ada paling banyak menyatakan bahwa pelaksanaannya kurang tepat waktu yaitu sebanyak 16 responden (32 %). menyusul responden yang menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak tepat waktu yaitu sebanyak 15 responden atau mencapai 30 %.

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan palakka, maka kita akan melihat partisipasi masyarakat yang sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan bantuan pemabngunan desa tersebut. Dari hasil penelitian penulis, maka akan dijumpai bentuk - bentuk partisifasi masyarakat berupa tenaga, dana, barang, dan pemikiran seperti yang kita lihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10  
 Bentuk - Bentuk Partisipasi Masyarakat  
 Di Wilayah Kecamatan Palakka  
 Tahun 1995

No	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	rosentase
1	Tenaga	19	38 %
2	Dana / Uang	14	28 %
3	Barang	12	24 %
4	Pemikiran	5	10 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber data : Hasil olahan penulis berdasarkan hasil kuisisioner, tahun 1995

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, merupakan yang paling banyak yaitu mencapai 38 % dan berupa uang sekitar 28 %, berupa barang sekitar 24 %, dan yang paling sedikit yaitu berupa pemikiran sekitar 10 %. hal tersebut diatas menunjukkan bahwa wujud partisipasi masyarakat secara umum telah ada namun walau secara totalitas belum menunjukkan hasil secara memuaskan, terutama partisipasi masyarakat dalam wujud uang mengingat bahwa pada umumnya masyarakat sebagian masih hidup disektor pertanian

yang tidak selamanya mempunyai persiapan yang cukup apabila pada musim persawahan. Pada umumnya dalam keadaan demikian, rata-rata tidak memiliki persiapan untuk hal-hal yang berada di dalam kebutuhan pokoknya sehari-hari dan keperluannya di sawah disamping juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan guna kelancaran dan suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri serta tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di pedesaan.

### 3. Pengawasan Penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pengawasan merupakan suatu bentuk usaha agar pelaksanaan suatu kegiatan sedapat mungkin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula serta untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Hal ini tentunya diperlukan pula dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan desa, oleh sebab itu maka ditunjuk oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab) Dati II Bone sebagai pengawas jalannya program khususnya program bantuan pembangunan desa.

Dari data yang penulis peroleh, dijelaskan kalau sejak tahun 1991/1992 - 1993/1994 pengawasan proyek bantuan pembangunan desa dilakukan 1 atau 2

kali dalam satu tahun anggaran.

Pengawasan ini pada prinsipnya mempunyai sasaran yaitu:

- a. memeriksa apakah segala pekerjaan yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana.
- b. Meneliti apakah perencanaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- c. Mengamati apakah dalam menyelenggarakan kegiatan - kegiatan masih sering timbul kesulitan atau hambatan yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Khususnya menyangkut penyelenggaraan bantuan pembangunan Desa di Wilayah kecamatan Palakka, pengawasan proyek tersebut biasanya dilakukan dengan cara pelaporan tertulis yang disampaikan oleh pimpro masing - masing, melalui SPJ tentang pelaksanaan fisik dan keuangan proyek, ataupun terjun ke lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan itu ternyata didapatkan suatu penyimpangan-penyimpangan, maka penyelesaiannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian yaitu :



- a. Bupati Membentuk tim khusus yang akan mengadakan pemeriksaan langsung ke Desa diamana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi.
- b. berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut, tindakan-tindakan lain yang diambil adalah :
  - Melakukan penuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Melakukan tuntutan berdasarkan hukum pidana melalui jalur pengadilan.

Berikut ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai pendapat masyarakat (responden) terhadap pengawasan proyek bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Palakka Kabupaten DATI II Bone.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11  
Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan  
Proyek Bantuan Pembangunan Desa  
DI kecamatan palakka, Tahun 1995

Tabel 11

NO	Kategori penilaian	Frekuensi	Prosentase
1	Baik	14	28 %
2	Cukup baik	11	22 %
3	Kurang baik	9	18 %
4	Tidak baik	16	32 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber data : Hasil olahan penulis berdasarkan hasil kuisioner, tahun 1995

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan kepada kita bahwa diantara 50 responden yang ada terdapat 14 responden (28 %) menyatakan bahwa pengawasan terhadap proyek bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka adalah baik, 11 responden (22 %) mengatakan cukup baik, 9 responden (18 %) yang menyatakan kurang baik, dan sebanyak 16 responden (32 %) menyatakan bahwa pengawasan proyek bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka tidak baik, dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pengawasan proyek bantuan pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Palakka belum dilaksanakan seperti yang telah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Masalah yang timbul dari segi pengawasan ini adalah kurangnya tenaga-tenaga teknis yang terdidik, sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan tenaga-tenaga pengawas yang terampil baik dari segi teknik proyek yang dibangun, maupun keterampilan mengatur tenaga-tenaga pelaksana proyek yang menyangkut pembagian kerja yang menurut waktu dan jumlah tenaga yang dibutuhkan sehingga pelaksanaannya menuntut penyelesaian menurut jadwal waktunya. Disamping itu pengadaan bahan-bahan pembangunan memerlukan pula pengawasan agar tidak menjadi pemborosan dan tidak mengurangi kualitas proyek yang dibangun, serta pengawasan terhadap keuangan juga menuntut tata administrasi yang teratur dan sempurna. Disini membutuhkan juga keterampilan dari para pejabat Desa bersama stafnya. masalah ketidak sempurnanya administrasi desa bukanlah masalah yang baru, usaha-usaha perbaikanpun melalui kursus-kursus dan latihan praktis kepada Kepala Desa atau Pegawai Desa, namun demikian

masih sering ditemukan adanya kesalahan atau ketidak sempurnaan di dalam pelaksanaannya.

4. Pertanggung jawaban pembangunan Bantuan Pembangunan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa, masalah pertanggung jawaban merupakan hal yang sangat penting terutama dalam hal penggunaan keuangan dan pelaksanaan proyek haruslah dipertanggung jawabkan, ini dimaksudkan agar pelaksanaan proyek atau kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Disamping itu kedudukan pimpinan proyek semakin baik dan dipercaya baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Pertanggung jawaban yang dimaksudkan disini dilakukan dalam bentuk laporan.

Pertanggung jawaban dalam bentuk laporan ini dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai dimana realisasi pelaksanaan proyek bantuan pembangunan Desa yang telah dilaksanakan.

Laporan pelaksanaan proyek bantuan desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa secara berkala, namun kenyataan yang penulis peroleh di Kecamatan Palakka khususnya di desa sample penelitian, bahwa laporan baru diberikan setelah penyelesaian proyek, inipun tidak semua desa memberikan laporan

sesuai dengan ketentuan yang ada. Keadaan ini tentunya menghambat jalannya pelaksanaan program bantuan pembangunan desa, sebab biasanya dana bantuan pembangunan desa tahun berikutnya hanya dapat dikeluarkan setelah adanya pertanggung jawaban proyek fisik/non fisik dan keuangan dari desa.

Berikut penulis akan memberikan gambaran mengenai pendapat masyarakat (responden) terhadap pelaksanaan laporan pertanggung jawaban mengenai kegiatan proyek fisik dan non fisik serta keuangan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka Desa sample penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12

Tanggapan responden terhadap laporan pertanggung  
 Jawaban Proyek Bantuan Pembangunan Desa  
 di Kecamatan Palakka, Tahun 1995

No	Kategori Penilaian	Frekwensi	Prosentase
1	Baik	14	28 %
2	Cukup baik	10	20 %
3	Kurang baik	11	22 %
4	Tidak baik	15	30 %
Jumlah		50	100 %

Sumber data : Hasil olahan Penulis berdasarkan  
 hasil kuisisioner, tahun 1995

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan kepada kita bahwa diantara 50 responden yang ada terdapat sebanyak 14 responden (28 %) yang menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka adalah baik, dan sebanyak 10 responden (20 %) menyatakan cukup baik, dan sebanyak 11 responden (22 %) yang menyatakan kurang baik, dan responden yang menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Palakka tidak baik sebanyak 15 atau mencapai 30 %.

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil jawaban tersebut dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan laporan

pertanggung jawaban proyek bantuan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palakka belum dilaksanakan sebagai mana mestinya atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena paling banyak responden yang menyatakan tidak baik.

C. Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Palakka.

1. Faktor-faktor pendorong

Pada kenyataannya ada beberapa urgensi penting yang menurut penulis menjadi faktor pendorong dalam kelancaran pelaksanaan program bantuan pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan Palakka antara lain :

a. Faktor Geografis

Letak Kecamatan Palakka berada di bagian barat Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dengan jarak  $\pm$  5 km dari Kotif Watampone.

Kecamatan Palakka berada pada jalan utama (jalan poros) serta letaknya yang strategis sehingga mudah dijangkau atau dikunjungi baik antar Desa, Kecamatan, maupun antar Kabupaten, sehingga arus transportasi lancar dan menyebabkan arus perkembangan pembangunan Desa di Wilayah ini dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.



b. Faktor Demografis (penduduk)

Di Kecamatan Palakka ini terutama di Desa sample penelitian mempunyai jumlah penduduk yang sangat menonjol diantara desa - desa yang ada di Wilayah Kecamatan tersebut. Dimana jumlah penduduk dalam hal ini potensi sumber daya manusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pembangunan desa ditunjang dengan potensi alam yang cukup seperti dapat dilihat dalam perincian berikut ini:

- Persawahan	seluas	3764,70 Ha
- Tegalan	seluas	1974,39 Ha
- Pekarangan	seluas	1839,46 Ha
- Perkebunan	seluas	661,64 Ha
- Hutan	seluas	508,70 Ha

Dengan adanya jumlah penduduk yang banyak potensi alam yang cukup merupakan salah satu modal yang penting bagi suatu Daerah dan sudah barang tentu merupakan faktor pendorong untuk lebih menggiatkan pembangunan baik masa sekarang, maupun dimasa yang akan datang serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan program-program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tingkat kehidupan sejahtera dan bahagia.

### c. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan yang penulis maksud dalam hal ini adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LKMD dan LMD) sebagai lembaga yang berfungsi menampung segala aspirasi yang timbul dikalangan masyarakat, serta instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh keterangan bahwa lembaga-lembaga yang ada pada setiap desa di Kecamatan Palakka satu sama lainnya saling menunjang yang dalam usahanya mendukung keberhasilan pembangunan desa. Kerjasama antar anggota dari lembaga-lembaga ini berjalan dengan baik yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan rasa sepenanggungan yang tinggi, dalam arti bahwa menghimpun tenaga dan daya. Dengan demikian program bantuan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik serta berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dimaksudkan disini adalah segala hal atau segala yang mempengaruhi kelancaran suatu kegiatan, sehingga menjadi penghambat terhadap suatu perkembangan pembangunan. Pada dasarnya masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Palakka adalah masalah-masalah

yang pokok yang tentunya dapat menjadi penghalang dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dari hasil wawancara oleh para informan, penulis memperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dengan adanya bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka antara lain:

a. Faktor kesadaran masyarakat

Faktor kesadaran masyarakat adalah merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan oleh karena masyarakatlah yang menjadi subyek dan sekaligus sebagai obyek dari pada pembangunan desa itu sendiri.

Pada kenyataannya di Wilayah Kecamatan Palakka menunjukkan bahwa masih dijumpai adanya kurang kesadaran sebahagian masyarakat, untuk berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan.

Konsekwensi dari kurang sadarnya masyarakat ini mengakibatkan tersendat sendatnya pelaksanaan pembangunan dan tentunya akan menghambat pencapaian tujuan.

b. Faktor Kemampuan Para Pengurus LKMD/LMD

Faktor kemampuan para pengurus LKMD/LMD tidak kalah pentingnya dengan yang lain, sehingga setiap pengurus dituntut adanya kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kurangnya kemampuan para pengurus LKMD/LMD dise-

babkan oleh kurangnya motivasi, bimbingan dan pelatihan-pelatihan, maka akibatnya para pengurus LKMD/LMD tersebut tidak mampu memotivasi, kepada masyarakat dalam setiap bidang kegiatan pembangunan. Oleh karena itu para petugas pelaksana harus menyadari bahwa dalam memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat harus memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat dan untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu diusahakan agar dapat memberikan pendidikan dan pelatihan.

Disamping itu pula perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang keanggotaan LKMD/LMD, yang pengangkatannya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tanpa memperhitungkan keahlian yang mereka miliki. Dengan cara seperti inilah yang menyebabkan lembaga tersebut sering dinilai tidak mampu menyusun perencanaan dengan baik, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Demikianlah beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang kesemuanya itu akan menjadi pendorong dan penghambat dalam kelancaran proses pembangunan khususnya di Wilayah Kecamatan Palakka. Terhadap faktor pendorong perlu kiranya lebih ditingkatkan dan dikembangkan, sedangkan terhadap faktor penghambat perlu segera dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak berlarut-larut

dana akhirnya nanti akan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.



## BAB V

### P E N U T U P

Apabila kita memperhatikan materi pembahasan sebagaimana yang telah diutarakan di muka, maka akan diperoleh suatu gambaran berbagai hal yang menyangkut bagaimana pengelolaan bantuan pembangunan desa ini dilakukan.

Dan sebagai kelanjutan dari segenap pembahasan itu, pada bab ini kita mencoba menggaris bawahi hal-hal yang sangat esensial untuk diperhatikan kembali dalam dua sub bahasan, yaitu :

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah suatu bentuk bantuan dari pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Desa, dengan maksud untuk mendorong dan menunjang kegiatan pembangunan di pedesaan, serta memancing swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pembangunan itu meliputi kebutuhan-kebutuhan dasar pembangunan desa yang tidak terdapat di pedesaan, dan pembangunan proyek-proyek prasarana desa.
2. Dalam proses pengelolaan bantuan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Palakka meliputi kegiatan, antara

#### a. Perencanaan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa dalam proses perencanaan tersebut pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dan kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam perencanaan mencapai 78 % dari responden yang telah ditentukan. Ini berarti bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka agak baik, tetapi belum dapat dikatakan baik karena terdapat 22 % responden yang sama sekali tidak terlibat dalam proses perencanaan proyek bantuan pembangunan desa.

#### b. Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek bantuan pembangunan desa, maka dibentuklah susunan pelaksana proyek antara lain :

- Kepala Desa selaku Pimpinan proyek
- Ketua 1 LKMD selaku pelaksana harian proyek
- Sekretaris desa selaku bendaharawan proyek.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka belum dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ( 1 tahun anggaran ), hal ini dapat diketahui dari hasil analisa data yang menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden (32 %) menyatakan bahwa pelaksanaannya kurang tepat waktu dan

sebanyak 15 responden (30 %) menyatakan tidak tepat waktu yang berarti keseluruhannya mencapai 62 %.

c. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek bantuan pembangunan desa sangat penting untuk dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pengawasan proyek bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dari hasil analisa tersebut memperlihatkan bahwa diantara 50 responden yang ada terdapat 9 (18 %) responden menyatakan bahwa pengawasan proyek tersebut kurang baik, dan sebanyak 16 (32 %) responden yang menyatakan tidak baik. Ini berarti bahwa keseluruhannya mencapai 50 %.

d. Pertanggung jawaban

Kenyataan menunjukkan bahwa pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek desa di Kecamatan Palakka belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dapat diketahui dari pendapat responden yakni sebanyak 11 (22 %) responden menyatakan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek kurang baik dan sebanyak 15 (30 %) yang menyatakan tidak baik. Ini berarti bahwa keseluruhannya mencapai 52 %.



3. Hasil pengelolaan bantuan pembangunan desa di Kecamatan Palakka dapat dikatakan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dikatakan demikian, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa swadaya masyarakat yang mampu diserap jumlahnya lebih rendah dari jumlah bantuan desa yang diberikan.

#### B. Saran-saran

Bertolak dari kesimpulan seperti yang telah diutarakan, beberapa saran yang penulis akan sampaikan disini antara lain :

1. Agar pengelolaan bantuan pembangunan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia termasuk desa-desa di Kecamatan Palakka dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya peningkatan pengetahuan atau keterampilan bagi aparat desa dengan melalui pendidikan, latihan keterampilan, dan lain-lain terutama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan program bantuan pembangunan desa perlu usaha untuk :
  - a. Meningkatkan peranan LKMD terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek serta memanfaatkan LKMD sebagai wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat.
  - b. Menjadikan LKMD sebagai tempat penampungan aspirasi masyarakat dan sumber informasi dari kegiatan

pembangunan.

3. Sebaiknya dalam kegiatan pengawasan dan pertanggung jawaban proyek yang sudah dibangun dilakukan secara sadar dan konsisten, mengingat banyaknya proyek-proyek yang sudah ditargetkan namun realisasinya masih jauh dari apa yang sudah ditetapkan dalam rencana.

Akhirnya penulis tutup seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dengan kalimat "Alhamdulillahirobbil Alamin", semoga semua materi yang telah diutarakan dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran ini mampu menjadi satu bahan masukan yang berguna bagi kita semua.

Amin...

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, I. Nyoman, Drs., 1982, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjodjo, H. Prof., 1986, Manajemen Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Emil Salim, 1984, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Gusti, I. Ketut Swalem, DRs., 1981, Manajemen Pembangunan Desa, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia.
- Hartoyo, 1986, Pembangunan Masyarakat Desa, CV. Karunia, Jakarta.
- Kuswata, Agustoha, R. Drs., 1985, Manajemen Pembangunan, Pedoman Program Terpadu, CV. Gramedia, Jakarta.
- Manulang, M. Drs., 1983, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Musanef, 1985, Sistem Pemerintahan di Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Pamudji, S. Drs., MPA, 1982, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminto, W.J.S., 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Saewingjo, Drs., 1980, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, S.P. Prof. Dr., MPA, 1984, Administrasi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1986, Filsafat Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono, DR., 1993, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sukarni, K., 1986, Dasar-Dasar Manajemen, Miswar, Jakarta.
- Taliziduhu, N. Drs., 1982, Metodologi Penelitian Pembangunan Desa, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Lain-lain :